P.T. GOODYEAR INDONESIA
HARGA POKOK PRODUKSI DAN PENJUALAN UNTUK TUJUH BULAN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 25 JULI 1980 DAN TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 1979 DAN 31 DESEMBER 1978
(Jumlah Dalam Ribuan)

	1980 (Tujuh Bulan)	1979 (Satu Tahun)	1978 (Satu Tahun)
BAHAN MENTAH YANG DIPAKAI	Rp. 12.698.796	Rp. 17.818.837	Rp. 10.815.546
UPAH BURUH -- LANGSUNG	351.509	473.561	331.163
BIAYA PABRIKASI			
Bahan pembantu	1.315.671	2.077.904	1.014.658
Upah buruh dan tunjangan - tak langsung	1.238.046	1.761.975	1.295.858
Penyusutan aktiva tetap	671.161	1.430.937	787.071
Bensin, gas dan listrik	408.307	587.555	289.956
Lain-lain	175.024	432.571	401.342
Jumlah Biaya Pabrikasi	3.808.209	6.290.942	3.788.885
JUMLAH BIAYA PRODUKSI	16.858.514	24.583.340	14.935.594
PERSEDIAAN BARANG DALAM PROSES			
Pada awal periode	663.970	348.820	265.172
Pada akhir periode	591.176	663.970	348.820
HARGA POKOK PRODUKSI	16.931.308	24.268.190	14.851.946
PERSEDIAAN BARANG JADI			
Pada awal periode	1.994.730	1.408.125	2.102.382
Pada akhir periode	1.116.704	1.994.730	1.408.125
HARGA POKOK PENJUALAN	Rp. 17.809.334	Rp. 23.681.585	Rp. 15.546.203
Catatan :			
Persediaan barang jadi akhir periode tersebut diatas tidak termasuk persediaan ban untuk dicoba dan lain-lain	Rp. 1.835	Rp. 2.906	Rp. 7.485

Lihat Catatan mengenai Laporan Keuangan.
(Dengan Laporan Drs. Utomo, Mulia & Co. No. 4229 tanggal 20 September 1980)

P.T. GOODYEAR INDONESIA
DAFTAR BEBAN PENJUALAN, ADMINISTRASI DAN DISTRIBUSI UNTUK
TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 25 JULI 1980 DAN TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1979 DAN 31 DESEMBER 1978
(Jumlah Dalam Ribuan)

	1980 (Tujuh Bulan)	1979 (Satu Tahun)	1978 (Satu Tahun)
<u>BEBAN PENJUALAN</u>			
Iklan	Rp. 195.475	Rp. 182.797	Rp. 182.706
Gaji	161.701	249.777	191.428
Biaya perjalanan	64.257	98.001	68.137
Penyusutan (*)	41.137	47.174	(8.290)
Telepon dan kawat	33.359	58.151	26.351
Hubungan masyarakat	24.631	13.517	15.587
Sewa dan perbaikan gedung	7.928	13.708	10.123
Biaya pemeliharaan	3.571	3.228	4.457
Pajak-pajak	2.983	4.059	3.855
Asuransi	1.598	2.574	1.834
Macam-macam biaya penjualan	45.953	80.308	79.385
Jumlah Beban Penjualan	Rp. 582.593	Rp. 753.294	Rp. 575.573
<u>BEBAN ADMINISTRASI</u>			
Gaji	161.970	241.313	177.253
Penyusutan (*)	39.698	21.939	(21.850)
Biaya kantor	26.816	32.800	27.637
Telepon dan kawat	13.813	22.153	15.215
Biaya audit dan konsultasi hukum	8.932	10.315	10.844
Sumbangan	8.239	3.731	165
Sewa dan perbaikan gedung	7.932	13.731	10.895
Alat kantor dan barang cetakan	7.404	15.741	9.385
Biaya bank	3.072	2.972	1.827
Biaya pemeliharaan	1.779	1.227	2.152
Asuransi	1.360	1.721	1.171
Pajak-pajak	1.141	1.586	1.343
Macam-macam biaya administrasi	16.178	27.361	19.882
Jumlah Beban Administrasi	Rp. 298.334	Rp. 396.590	Rp. 255.919
<u>BEBAN DISTRIBUSI</u>			
Gaji bagian gudang	Rp. 80.516	Rp. 113.336	Rp. 91.314
Penyusutan (*)	37.158	57.665	(14.472)
Biaya pengiriman	36.223	53.286	50.728
Sewa dan perbaikan gedung	27.097	42.920	50.644
Gaji bagian distribusi	19.918	36.177	25.496
Telepon dan kawat	7.192	11.740	6.667
Asuransi	4.431	9.736	8.037
Pajak-pajak	1.071	1.492	1.484

	1980 (Tujuh Bulan)	1979 (Satu Tahun)	1978 (Satu Tahun)
Biaya pemeliharaan	607	979	679
Macam-macam biaya distribusi	<u>10.810</u>	<u>27.780</u>	<u>15.511</u>
Jumlah Beban Distribusi	Rp. <u>225.023</u>	Rp. <u>355.111</u>	Rp. <u>236.088</u>
Jumlah Beban Penjualan, Administrasi dan Distribusi	<u>Rp. 1.105.950</u>	<u>Rp. 1.504.995</u>	<u>Rp. 1.067.580</u>

(*) Termasuk pembebanan/pengkreditan untuk rugi/laba penjualan aktiva tetap.

Lihat Catatan mengenai Laporan Keuangan.
(Dengan Laporan Drs. Utomo, Mulia & Co. No. 4229 tanggal 20 September 1980)

ANGGARAN DASAR PERSEROAN

1. Pendirian Perseroan dan perubahan-perubahan Anggaran Dasar

Perseroan didirikan tanggal 26 Januari 1917 dengan Akta Notaris Benjamin ter Kuile, Notaris di Surabaya No. 199 tanggal 26 Januari 1917 di Surabaya yang disahkan oleh Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië dengan Keputusan No. 50 tanggal 23 Mei 1917 dan didaftarkan di Kantor Raad van Justitie Surabaya tanggal 31 Mei 1917 No. 141 dan diumumkan dalam Extra Bijvoegsel No. 217 dari Javasche Courant No. 64 tanggal 10 Agustus 1917.

Adapun Anggaran Dasar Perseroan berturut-turut telah diadakan perubahan dengan Akta Notaris sebagai berikut :

1. Akta Notaris Pengganti Moester Nicolaas August Mispelblom van Altena No. 62 tanggal 22 April 1935 dan telah diumumkan dalam Bijvoegsel Nomor 98 dari De Javasche Courant No. 51 tanggal 25 Juni 1935;
2. Akta Notaris Eliza Pondaag Nomor 73 tanggal 31 Oktober 1977 dan Nomor 45 tanggal 12 Juni 1978 dan telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 623 dari Berita Negara Republik Indonesia Nomor 86 tanggal 27 Oktober 1978;
3. Akta Notaris Eliza Pondaag Nomor 38 tanggal 15 Agustus 1979 dan Nomor 28 tanggal 7 Desember 1979 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Nomor Y.A. 5/499/7 tanggal 17 Desember 1979.
4. Akta Notaris Kartini Muljadi S.H. No. 2 tanggal 1 Nopember 1980 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. YA. 5/513/20, tanggal 6 Nopember 1980.

2. Beberapa Kutipan dari Anggaran Dasar Perseroan

Berikut ini adalah kutipan-kutipan dari Anggaran Dasar Perseroan.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. - Perseroan ini bernama : "P.T. GOODYEAR INDONESIA" dan berkedudukan di Jakarta.
2. - Perkataan "GOODYEAR" didalam nama "P.T. GOODYEAR INDONESIA" telah dipergunakan dengan persetujuan "THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY" dari Akron, Ohio, Amerika Serikat dan berhubung "THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY" telah mengambil bagian yang terbanyak dalam modal perseroan tersebut.
- Jika maksud dan tujuan dari perseroan menurut pasal 3 berubah atau jika "THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY" tidak mempunyai lagi bagian yang terbanyak dalam perseroan, maka berdasarkan keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham, perseroan diwajibkan untuk menghilangkan nama "GOODYEAR" dari nama perseroan ini, kecuali jika "THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY" dengan tegas memberikan persetujuan secara tertulis untuk membiarkan nama perseroan tidak berubah.
3. - Perseroan dapat membuka kantor-kantor, cabang-cabang dan kantor-kantor perwakilan ditempat-tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah menjalankan perindustrian dan khususnya :

- a. — untuk membuat dan mengerjakan ban-ban luar, ban-ban dalam, bahan-bahan pembetulan, suku-suku cadang otomotif ("automotive accessories") dan hasil-hasil lain dari karet dan/atau pengganti karet, sendiri atau digabungkan dengan bahan-bahan lainnya dan memperdagangkan serta mengekspor hasil-hasilnya;
- b. — untuk membuat, mengerjakan dan menyiapkan bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan untuk membuat hasil-hasil perseroan dan memperdagangkan dan mengekspornya;
- c. — untuk berusaha dalam penanaman, penumbuhan, pengebunan ("cultivation"), pengumpulan, pengawetan ("curing"), pembuatan, pengolahan, pembelian, penjualan karet dan dengan cara apapun berdagang karet, pohon atau bibit karet, atau bahan-bahan sehubungan dan hasil-hasil sambilan ("allied materials and by-products"), atas biaya sendiri atau biaya pihak lain;
- d. — untuk ikut serta dalam perusahaan-perusahaan dan perseroan-perseroan lain, yang tujuan-tujuannya seluruh maupun sebagiannya mirip dengan tujuan-tujuan perseroan ini dan untuk mengurus, membantu, memberi nasehat perseroan-perseroan itu, tanpa mengurangi izin yang wajib;
- e. — pada umumnya, untuk mengerjakan segala sesuatu untuk mencapai maksud-maksud dan tujuan-tujuan perseroan ini, segala sesuatu dalam arti kata seluas-luasnya, dengan tidak mengurangi persyaratan-persyaratan dan perijinan-perijinan dari pihak yang wajib, serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

MODAL

Pasal 4

1. — Modal dasar perseroan adalah sebesar Rp. 41.000.000.000,— (empat puluh satu milyar), terbagi atas 41.000.000 (empat puluh satu juta) saham-saham biasa, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000,— (seribu rupiah).
2. — Dari saham-saham tersebut diatas telah diambil bagian dan disetor penuh oleh :
— THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY : 41.000.000 (empat puluh satu juta) saham-saham dengan harga nominal seluruhnya Rp. 41.000.000.000 (empat puluh satu milyar rupiah).
3. — Dalam hal ada penambahan modal dasar lebih lanjut, maka setiap pengeluaran saham-saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Direksi untuk mengeluarkan suatu jumlah tambahan saham-saham, dan Direksi menentukan harga saham-saham yang akan dikeluarkan itu serta syarat-syarat lain yang dianggap perlu.
4. — Dalam hal pemegang saham lalai melakukan pembayaran kepada perseroan untuk setiap jumlah yang masih harus dibayar atas saham-saham yang telah dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan oleh perseroan, Direksi berhak untuk menagih pembayaran itu kepada pemegang saham tersebut dengan memberikan kepada pemegang saham itu suatu surat penagihan sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pembayaran yang ditentukan oleh Direksi dalam surat penagihan itu.
5. — Bilamana pembayaran tidak dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal yang ditetapkan dalam penagihan tersebut, maka pemegang saham yang bersangkutan harus membayar denda atas jumlah yang tertunggak sebesar 5% (lima persen) sebulan, dihitung sejak tanggal pembayaran jumlah tersebut yang ditetapkan oleh Direksi dalam penagihannya itu sampai seluruh harga saham-saham itu dibayar penuh.

SAHAM-SAHAM

Pasal 5

1. - Semua saham dalam perseroan adalah saham biasa dan atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya sebagaimana terdaftar dalam daftar pemegang saham perseroan.
2. - Untuk setiap saham harus dikeluarkan satu surat saham dimana harus tercantum tanda-tangan tanda-tangan dari 2 (dua) orang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi, kecuali apabila perseroan mengeluarkan surat kolektif.
3. - Suatu surat kolektif dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham, dalam mana harus disebutkan jumlah dan nomor-nomor surat dari saham-saham yang bersangkutan.
 - Pada surat kolektif juga harus tercantum tanda-tangan tanda-tangan dari 2 (dua) orang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.
4. - Surat-surat saham itu harus diberi nomor urut dan setiap surat saham harus dibubuhi tanggal pengeluaran, berikut dengan tanda-tangan pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi dan harus menyatakan larangan-larangan dan pembatasan-pembatasan yang berlaku atas saham-saham tersebut sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini dan dalam perubahan-perubahan dari anggaran dasar ini dikemudian hari.
5. - Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang, baik perorangan atau suatu badan hukum, sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
 - Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka orang-orang yang mempunyai hak milik bersama itu harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam daftar pemegang saham perseroan dan wakil ini harus dianggap sebagai pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak yang berdasarkan undang-undang timbul atas saham tersebut.
 - Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada perseroan mengenai penunjukan wakil bersama mereka atau sebelum perseroan menerima pemberitahuan secara tertulis mengenai penunjukan wakil bersama itu, perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham tersebut.
6. - Anggaran dasar ini dan semua perubahan lebih lanjut atas anggaran dasar ini serta semua keputusan yang diambil secara sah oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham adalah mengikat untuk semua pemegang saham.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-SAHAM

Pasal 8

1. - Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam daftar pemegang saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai, cession yang menyangkut saham-saham perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin dari pihak yang berwajib berdasarkan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai penanaman modal asing.
2. - Semua pemindahan hak atas saham-saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani baik oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak maupun oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan, dan pihak yang memindahkan hak harus tetap dianggap sebagai pemegang saham itu sampai nama pihak yang menerima pemindahan hak dicatat dalam daftar pemegang saham dengan tidak mengurangi ijin yang berwajib.
 - Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia harus memenuhi peraturan-peraturan Bursa tersebut yang berlaku dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengenai pemindah-tanganan saham.

3. – Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam daftar pemegang saham apabila cara-cara yang disyaratkan dalam anggaran dasar perseroan ini dan cara-cara yang ditentukan oleh Rapat Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari syarat-syarat dalam ijin-ijin yang diberikan kepada perseroan oleh pihak yang berwajib tidak dipenuhi.
4. – Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka mereka wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi perseroan.
 - Mengenai saham-saham perseroan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan-peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. – Pendaftaran dari pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal dikirimkannya panggilan-panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham atau Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham sampai dengan tanggal penutupan Rapat tersebut.
6. – Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian atau kepailitan seorang pemegang saham, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham.
 - Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.
7. – Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam anggaran dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 dari pasal ini.

PENGURUSAN

Pasal 9

1. – Perseroan diurus oleh suatu Direksi dibawah pengawasan suatu Dewan Komisaris.
 - Direksi terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota yang sekurang-kurangnya dua diantaranya berkewarganegaraan Indonesia.
 - Susunan Direksi adalah sebagai berikut:
 - a. – 1 (satu) orang Presiden Direktur;
 - b. – 1 (satu) orang Wakil Presiden Direktur;
 - c. – 5 (lima) orang Direktur.
2. – Dengan mengingat pada ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat 4 dan 5 dari pasal ini, para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk jangka waktu sejak tanggal Rapat Umum Para Pemegang Saham dimana mereka diangkat sampai penutupan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang ketiga setelah Rapat Umum Para Pemegang Saham yang mengangkat mereka.
 - Pengangkatan-pengangkatan para anggota Direksi berlaku sejak penutupan Rapat yang mengangkat mereka.
3. – Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
4. – Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat memberhentikan seorang anggota Direksi jika ada alasan untuk itu sebelum masa jabatannya berakhir.
 - Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut.

5. – Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 4 pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini.
 - Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut harus mengundurkan diri pada waktu yang sama seakan-akan ia telah menjadi anggota Direksi pada hari anggota Direksi yang digantikannya itu diangkat sebagai anggota Direksi.
6. – Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tigapuluh) hari sebelumnya.
7. – Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :
 - a. – dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan, atau
 - b. – diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 4 dari pasal 9 ini, atau
 - c. – dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuan dari suatu Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau
 - d. – mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis, atau
 - e. – meninggal dunia.
8. – Gaji para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Dewan Komisaris.
9. – Apabila jabatan seorang anggota Direksi lowong, Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah terjadinya lowongan itu, untuk mengisi lowongan tersebut dan selama jangka waktu sebelum Rapat tersebut, Dewan Komisaris harus menunjuk salah satu dari para anggota Dewan Komisaris untuk memikul tanggung jawab dari anggota atau para anggota Direksi yang menyebabkan lowongan tersebut.

WEWENANG DIREKSI

Pasal 10

1. – Seorang atau lebih anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Rapat Direksi bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama sebagaimana ditentukan oleh Rapat Direksi, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
2. – Direksi mewakili dan mengikat perseroan, baik didalam maupun diluar Pengadilan dan berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan segala perbuatan pengurusan dan segala perbuatan pemilikan, dengan ketentuan bahwa persetujuan tertulis dari Rapat Dewan Komisaris diperlukan untuk tindakan-tindakan berikut :
 - a. – pinjaman dari siapapun, badan hukum atau perseroan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun atau lebih, apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi suatu jumlah yang sama dengan 20% (dua-puluh persen) dari jumlah modal perseroan yang telah disetor penuh dan cadangan-cadangan sebagaimana sewaktu-waktu ternyata dari laporan keuangan perseroan yang telah diperiksa dan disahkan oleh akuntan publik;
 - untuk keperluan ini keputusan dari akuntan publik adalah mutlak dan mengikat;
 - b. – memberi jaminan hutang atau tanggungan untuk seseorang, badan hukum atau perseroan, apabila jumlah yang dijamin itu melebihi suatu jumlah yang sama dengan 20% (dua-puluh persen) dari jumlah modal perseroan yang telah disetor penuh dan cadangan-cadangan sebagaimana sewaktu-waktu ternyata dari laporan keuangan perseroan yang telah diperiksa dan disahkan oleh akuntan publik;
 - untuk keperluan ini keputusan dari akuntan publik adalah mutlak dan mengikat;

- c. — memasang hipotik, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan atau kekayaan-kekayaan perseroan yang merupakan suatu jumlah yang sama dengan atau melebihi 20% (dua puluh persen) dari nilai buku dari seluruh jumlah kekayaan perseroan sebagaimana sewaktu-waktu ternyata dari laporan keuangan perseroan yang telah diperiksa dan disahkan oleh akuntan publik;
 - untuk keperluan ini keputusan akuntan publik adalah mutlak dan mengikat.
- 3. — Persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal 10 ini harus dibuktikan dengan berita acara atau kutipan dari berita acara Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, yang dikeluarkan dan ditanda-tangani oleh Ketua Rapat tersebut atau oleh notaris yang telah membuat berita acara yang bersangkutan.
- 4. — Pembagian pekerjaan antara para anggota Direksi diatur dan ditentukan oleh Rapat Direksi.
- 5. — Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dan memberikan kepada mereka wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan cara mengeluarkan surat kuasa; wewenang demikian itu harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar ini.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 12

- 1. — Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang sekurang-kurangnya seorang diantaranya adalah berkewarga-negaraan Indonesia.
 - Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :
 - a. — 1 (satu) Presiden Komisaris;
 - b. — 2 (dua) orang Komisaris.
- 2. — Seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih yang ditunjuk secara tertulis oleh Rapat Dewan Komisaris berhak bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris.
- 3. — Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat 5, 6 dan 7 dari pasal ini, para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk jangka waktu sejak tanggal Rapat Umum Para Pemegang Saham yang mengangkat mereka sampai penutupan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang ketiga setelah Rapat Umum Para Pemegang Saham yang mengangkat mereka, dan setelah masa jabatannya berakhir, mereka dapat segera diangkat kembali.
- 4. — Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
 - Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut.
- 5. — Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 4 pasal ini.
- 6. — Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tigapuluh) hari sebelumnya.
- 7. — Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :
 - a. — dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan, atau
 - b. — diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 4 dari pasal 12 ini, atau
 - c. — dilarang menjabat anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau
 - d. — mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam ayat 6 dari pasal 12 ini, atau
 - e. — meninggal dunia.

8. – Para anggota Dewan Komisaris dapat menerima uang jasa atau honorarium sebagaimana yang ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
9. – Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong, maka Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut.
 - Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan secara yang dimaksudkan dalam ayat 4 pasal ini atau untuk mengisi lowongan, harus mengundurkan diri pada waktu yang sama seakan-akan ia telah menjadi anggota Dewan Komisaris pada hari anggota Dewan Komisaris yang digantikannya itu diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 13

1. – Dewan Komisaris ditugaskan untuk mengawasi pengurusan perseroan oleh Direksi.
2. – Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh perseroan dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan perseroan.
3. – Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. – Pada setiap waktu Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka), apabila ia (mereka) melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar ini atau merugikan maksud dan tujuan perseroan atau ia (mereka) melalaikan kewajibannya (kewajiban mereka).
5. – Setelah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris harus memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang harus diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara tersebut dan yang harus diketuai oleh seorang anggota Dewan Komisaris dan panggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 19 dibawah ini.
 - Rapat demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah (para) anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu, diberhentikan atau tidak, demikian setelah memanggil (para) anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dan setelah memberikan kepadanya (kepada mereka) cukup kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan-tuduhan atas dirinya (diri mereka).
6. – Apabila Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tersebut tidak dipanggil dalam waktu 1 (satu) bulan, maka pemberhentian sementara itu dengan sendirinya berakhir.
7. – Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, Dewan Komisaris akan mengurus perseroan untuk sementara waktu.
 - Dalam kejadian demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus perseroan.

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 16

1. – Terdapat 2 (dua) macam Rapat Umum Para Pemegang Saham :
 - a. – Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham adalah Rapat Umum Para Pemegang Saham yang dimaksud dalam pasal 17 dibawah ini.

- b. – Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham adalah semua Rapat Umum Para Pemegang Saham diluar Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham;
- 2. – "Rapat Umum Para Pemegang Saham" dalam anggaran dasar ini berarti kedua-duanya, yakni Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham.

RAPAT UMUM TAHUNAN PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 17

- Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus diadakan sekali setahun, selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tiap-tiap tahun, dalam Rapat mana :
 - a. – Direksi harus memberikan laporan perihal jalannya perseroan dan tata usaha keuangan dari tahun buku yang baru selesai;
 - b. – neraca dan perhitungan rugi laba dari tahun buku yang baru selesai, yang telah diperiksa harus diajukan untuk mendapat persetujuan;
 - c. – penggunaan keuntungan dari tahun-tahun buku yang lalu harus ditentukan dan disetujui;
 - d. – bilamana perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan penentuan gaji dari para anggota Dewan Komisaris;
 - e. – dilakukan pengangkatan akuntan publik (auditor);
 - f. – diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai dengan anggaran dasar ini.

RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

- 1. – Direksi dapat memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham bilamana dianggap perlu dan Direksi wajib memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham atas permintaan secara tertulis dari seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham perseroan yang telah dikeluarkan atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan menyebutkan dalam permintaan itu hal-hal yang akan dibicarakan.
 - Apabila Direksi tidak memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dalam waktu 2 (dua) bulan setelah diterimanya permintaan tersebut, maka para pemegang saham atau para anggota Dewan Komisaris yang menanda-tangani permintaan itu berhak untuk memanggil Rapat itu atas biaya perseroan dengan memperhatikan sebagaimana mestinya ketentuan-ketentuan yang tertera dalam anggaran dasar ini, pada Rapat mana Ketua Rapat harus dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dan semua keputusan Rapat itu adalah sah dan mengikat perseroan, asal saja semua persyaratan dalam anggaran dasar ini mengenai quorum dan persyaratan untuk pemungutan suara untuk hal yang keputusannya diusulkan itu, dipenuhi sebagaimana mestinya.
- 2. – Kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini, Rapat Umum Para Pemegang Saham adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, hanya apabila dalam Rapat itu hadir dan/atau diwakili dengan surat kuasa, para pemegang saham yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh persen) dari saham-saham yang dikeluarkan oleh perseroan.

HAK SUARA DALAM RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

- 1. – Kecuali jika ditentukan lain dalam anggaran dasar ini, semua keputusan harus diambil berdasarkan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah.

2. – Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
3. – Pada setiap Rapat Umum Para Pemegang Saham, suatu usul yang diajukan untuk dipungut suara harus diputuskan dengan mengangkat tangan, kecuali apabila suatu pemungutan suara secara tertulis diminta (sebelum dilakukan pemungutan suara dengan mengangkat tangan dilakukan) :
 - a. – oleh Ketua Rapat Umum Para Pemegang Saham; atau
 - b. – oleh seorang pemegang saham atau para pemegang saham yang hadir sendiri atau berdasarkan surat kuasa dan mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham perseroan yang telah dikeluarkan;
4. – Setiap hal yang diajukan untuk dibicarakan atau untuk pemungutan suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat sebagai berikut :
 - (a) hal-hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan;
 - (b) hal-hal tersebut diajukan oleh para pemegang saham yang mewakili sedikitnya 5% (lima persen) dari seluruh saham perseroan yang telah dikeluarkan;
 - (c) menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha perseroan; dan
 - (d) usul-usul untuk pengangkatan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi sudah harus disampaikan kepada Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat.
5. – Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, baik dengan mengangkat tangan atau dengan pemungutan suara secara tertulis, maka Ketua Rapat berhak untuk menentukan bahwa pemungutan suara yang kedua akan diadakan.
 - Jika Ketua Rapat memutuskan untuk tidak mengadakan pemungutan suara yang kedua, maka usul yang sedang dipertimbangkan dianggap ditolak.
 - Jika pada pemungutan suara yang kedua, suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya lagi, maka usul yang bersangkutan juga harus dianggap ditolak.
6. – Para pemegang saham dapat diwakili dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham oleh orang lain berdasarkan surat kuasa, akan tetapi para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan para pegawai perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa dari para pemegang saham perseroan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham dan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham.
 - Suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa adalah tidak sah.
 - Surat Kuasa harus dibuat dan ditanda-tangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi perseroan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Para Pemegang Saham yang bersangkutan.
7. – Para Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham, asal saja usul yang bersangkutan telah diberitahukan secara tertulis kepada semua pemegang saham perseroan dan semua pemegang saham menyetujui usul yang bersangkutan secara tertulis.
 - Keputusan demikian harus dianggap sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham.
8. – Suara-suara blanko dan suara-suara tidak sah harus dianggap sebagai dikeluarkan tidak sah dan dengan demikian dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

PENGGUNAAN KEUNTUNGAN

Pasal 22

1. – Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham mengenai penggunaan dari pendapatan bersih sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan yang belum terbagi dapat dipergunakan sebagai dana cadangan khusus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 dibawah ini.
2. – Dividen-dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen-dividen.
 - Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Para Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen-dividen itu diambil.
 - Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.
3. – Diperkenankan untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan perseroan memungkinkannya berdasarkan atas keputusan Rapat Direksi dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan atas keputusan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.
4. – Dalam hal perhitungan rugi laba dalam 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 dibawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dalam perhitungan rugi laba dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya perseroan harus dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang dicatat dalam perhitungan rugi laba belum tertutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. – Dividen-dividen yang tidak dituntut dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dapat dibayarkannya tidak dapat dibayarkan lagi dan harus dikembalikan kepada perseroan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN PERSEROAN

Pasal 24

1. – Perubahan atas anggaran dasar ini, termasuk merubah nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan perseroan, melikwidasi perseroan sebelum berakhirnya jangka waktu yang dimaksud dalam pasal 2 diatas, memperpanjang jangka waktu tersebut, memperbesar atau mengurangi modal dasar perseroan (keputusan mengenai pengurangan modal dasar wajib diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sebuah surat kabar harian atau lebih yang beredar ditempat kedudukan perseroan untuk kepentingan para kreditur) hanya dapat dilakukan atas kekuatan keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk maksud itu, dalam Rapat mana sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan harus diwakili dan juga disetujui oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.
2. – Bilamana dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat dimuka ini jumlah saham-saham yang diwakili tidak mencapai quorum yang disyaratkan diatas, maka dalam waktu 21 (duapuluh satu) hari dan secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari kemudian dapat diadakan Rapat untuk kedua kalinya, dengan ketentuan-ketentuan yang sama sebagaimana disyaratkan untuk Rapat pertama, dalam Rapat mana dapat diambil keputusan-keputusan mengenai usul-usul yang diajukan dalam Rapat pertama asal saja keputusan-keputusan tersebut diambil dengan jumlah suara terbanyak dari suara yang dikeluarkan dengan sah.

3. - Semua yang tersebut diatas ini, tanpa mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang.

PELAKSANAAN LIKWIDASI

Pasal 25

1. - Dalam hal diambil keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk melikwidasi perseroan, maka likwidasi akan dilakukan oleh Direksi, kecuali jika Rapat Umum Para Pemegang Saham menentukan lain.
2. - Keputusan-keputusan untuk melikwidasi harus didaftarkan pada kantor Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional bersama-sama dengan pemberitahuan untuk maksud itu kepada para kreditur.
3. - Anggaran dasar sebagaimana yang termaktub dalam akte ini atau perubahan-perubahan selanjutnya, tetap berlaku sampai hari perhitungan dari likwidasi disahkan dalam suatu Rapat Umum Para Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya diberikan kepada para likwidatur.
4. - Sisa perhitungan likwidasi harus dibagi antara para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang mereka miliki masing-masing.

SYARAT-SYARAT PENAWARAN SAHAM

1. Permohonan Pembelian Saham : Permohonan Pembelian Saham harus diajukan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang tercantum pada Formulir Permohonan Pembelian Saham. Permohonan yang diajukan dengan cara yang menyimpang dari petunjuk-petunjuk tersebut tidak akan dilayani.
2. Pemohon Yang Berhak :
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Lembaga/Badan Usaha Indonesia yang ditunjuk dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 313/KMK. 011/1979 tanggal 13 Juli 1979.
3. Permohonan Minimum : Permohonan Pembelian Saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan dari 50 saham.
4. Pengajuan Permohonan Pembelian Saham : Setiap pemohon harus mengajukan permohonannya kepada Penjamin Emisi atau Makelar Efek selama jam kerja yang umum berlaku sebelum masa penawaran ditutup.
5. Masa Penawaran : Masa penawaran akan dimulai pada tanggal 24 Nopember 1980 dan ditutup tanggal 6 Desember 1980.
6. Ketentuan Khusus Untuk Karyawan Perseroan : Karyawan Perseroan dapat mengajukan Permohonan Pembelian Saham untuk jumlah sekurang-kurangnya 50 saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan dari 50 saham. Formulir Permohonan Pembelian Saham tersebut harus diperoleh dari Perseroan dan diajukan langsung kepada Perseroan tanpa melalui Penjamin Emisi atau Makelar Efek.
7. Syarat Pembayaran : Pembayaran penuh pada saat pengajuan Permohonan Pembelian Saham dapat dilakukan dengan uang tunai atau cek ataupun wesel bank yang dibayarkan kepada Penjamin Emisi atau Makelar Efek tempat menyampaikan Formulir Permohonan Pembelian Saham. Semua biaya bank, komisi bank serta biaya-biaya transfer ke Jakarta menjadi tanggungan pemohon. Semua cek dan wesel bank akan dicairkan segera setelah diterima dan bilamana ada cek-cek yang ditolak oleh Bank pada saat pencairan, maka Permohonan Pembelian Saham yang bersangkutan akan ditolak.
8. Bukti Tanda Terima : Penjamin Emisi atau Makelar Efek yang menerima pengajuan Permohonan Pembelian Saham akan menyerahkan kepada pemohon satu tembusan dari Formulir Permohonan Pembelian Saham sebagai Bukti Tanda Terima Permohonan Pembelian Saham ini. Bukti Tanda Terima Permohonan ini tidak merupakan jaminan bahwa permohonan tersebut dipenuhi.

9. Alokasi Saham : Apabila jumlah saham yang diminta dalam Permohonan Pembelian Saham melampaui jumlah saham yang ditawarkan, maka penjatahan saham-saham tersebut akan dilakukan oleh masing-masing Penjamin Emisi dengan cara sedemikian rupa sehingga pengikut-sertaan dalam pemilikan saham-saham itu akan tersebar luas.
10. Pengembalian Uang : Pengembalian uang sebagian atau seluruhnya dari pembayaran atas Permohonan Pembelian Saham yang ditolak seluruhnya atau disetujui sebagian saja, akan dikembalikan dalam waktu yang secepatnya, selambat-lambatnya pada saat penyerahan saham oleh Penjamin Emisi atau Makelar Efek yang menerima pengajuan Permohonan Pembelian Saham tersebut. Pemohon dapat mengambil uang pengembalian ini dengan memperlihatkan kembali Bukti Tanda Terima.
11. Penyerahan Saham : Surat saham yang bertalian dengan jumlah saham yang Permohonan Pembelian Sahamnya telah disetujui, akan dikirimkan oleh Penjamin Emisi atau Makelar Efek yang menerima pengajuan Permohonan Pembelian Saham tidak lebih dari 3 (tiga) minggu setelah masa penawaran ditutup. Penjamin Emisi atau Makelar Efek akan memberitahukan pemohon bahwa surat saham telah tersedia dan dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima.
12. Lain – Lain : Para Penjamin Emisi berhak untuk menyetujui atau menolak Permohonan Pembelian Saham secara keseluruhan atau sebagian dan berhak menolak Permohonan Pembelian Saham yang diajukan dengan memakai nama lebih dari satu orang dan setiap Permohonan Pembelian Saham yang tidak dilengkapi sebagaimana mestinya.